



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HERRY HERNAWAN**
2. Jabatan : **KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**
3. NHK : **799173**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. **5.100.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 2.450.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/52 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 45 m2/117 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
4. Tanah Seluas 948 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. **155.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA SIENTA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. **190.500.000**

D. SURAT BERHARGA

Rp. **391.929.000**

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. **422.121.460**

F. HARTA LAINNYA

Rp. **---**

Sub Total

Rp. **6.259.550.460**

III. HUTANG

Rp. **73.700.000**



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

6.185.850.460

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.